

Analisis Adopsi Inovasi Antar Jemput Izin Bermotor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Dimensi Lingkungan dan Organisasi) = Analysis of Adoption Innovation Motorcycle Pick up Service (Ajib) Jakarta Investment and Integrated One Stop Service.

Dani Setiarini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20500841&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan teknologi serta masyarakat yang semakin kompleks, telah menciptakan permintaan akan layanan publik yang lebih baik. Pemecahan masalah layanan publik tidak bisa lagi menggunakan metode lama dan cara yang biasa. Organisasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah, dituntut mencari solusi kreatif dengan memaksimalkan sumber dayanya dan ini dilakukan melalui inovasi. Fenomena munculnya berbagai inovasi di sektor publik memberi warna baru dalam implementasi layanan publik. Kehadiran layanan antar jemput izin bermotor (AJIB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan terobosan inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat untuk memangkas waktu dan biaya dalam proses pengurusan perizinan, sekaligus untuk menghilangkan praktik perantara/calo perizinan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi masyarakat terhadap inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) ini masih rendah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian post positivis dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini menjawab faktor faktor apa yang mempengaruhi adopsi inovasi layanan antar jemput bermotor (AJIB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dimensi lingkungan dan organisasi. Pisau analisis menggunakan analisis faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi, yang dikemukakan oleh De Vries, et.al (2018) spesifik pada dimensi lingkungan dan organisasi. Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya adopsi inovasi AJIB dari dimensi lingkungan dan organisasi yaitu tidak dilibatnya stake holders lain seperti masyarakat dan pihak swasta dalam proses pembuatan AJIB, munculnya regulasi terkait penerapan e government dalam proses perizinan, kurangnya pelatihan bagi petugas AJIB, serta sulitnya akses pemesanan AJIB melalui aplikasi AJIB pada playstore oleh masyarakat.

<hr>

ABSTRACT

The development of technology and an increasingly complex society, has created a demand for better public services. In order to solve problems related to public services, innovation and unconventional method needed. The government required to find creative solutions by maximizing its resources and this is done through innovation. The phenomenon of the emergence of various innovations in the public sector gives a new color in the implementation of public services. The presence of a motorized pickup

service (AJIB) from the Capital Investment and Integrated Services Office of the DKI Jakarta Province is a breakthrough innovation as an effort to improve service quality. AJIB purpose is to make it easier for the public to cut time and costs in the licensing process, as well as to eliminate the practice of intermediaries / brokers licensing. However, in its implementation, the level of public adoption of the innovation of the Motorized Vehicle Shuttle Service (AJIB) is still low. By using a post positivist research approach and qualitative data collection methods, this study answers what factors influence the adoption of motorized shuttle service innovation (AJIB) of the One Stop Investment and Integrated Services Office on environmental and organizational dimensions. Analysis using factor that influences the adoption of innovations by De Vries, et.al (2018) spesifically on environtmental and organization dimension. From the results of the study, there are several factors that influence the low adoption of AJIB innovations in the environmental and organizational dimensions, which is no involvement of other stakeholders such as the public and private parties in the process of making AJIB, the emergence of regulations related to the implementation of e-government in the licensing process, lack of training for AJIB officers, and the difficulty of accessing AJIB reservations through the AJIB application on the public playstore.